

PERSYARATAN PENGAJUAN PEREMAJAN SAWIT RAKYAT (PSR) BESERTA CONTOH



**Dewan Pimpinan Pusat
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
(APKASINDO)**

TAHAPAN PENGAJUAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)

Peremajaan sawit rakyat (PSR) ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga luasan lahan perkebunan sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Peremajaan dilakukan melalui pergantian tanaman tua atau tidak produktif dengan tanaman baru. Tahapan pengajuan PSR dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Tahapan	Penjelasan
1	Kriteria peremajaan sawit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanaman berumur > 25 tahun 2. Produktivitas kebun < 10 ton TBS/Ha/tahun, minimal umur tanaman 7 tahun 3. Kebun yang menggunakan bibit tidak unggul paling sedikit 2 tahun
2	Proses Pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan PSR dilakukan oleh Koperasi/Kelompok Tani/GAPOKTAN melalui aplikasi Online PSR. 2. proses verifikasi akan dilakukan berjenjang oleh Disbun Kab/Kota, Disbun Provinsi/Dirjenbun. 3. Proses verifikasi dapat juga dilakukan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Dirjenbun
3	Proses Persetujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjenbun menetapkan rekomendasi teknis atas pengusulan peremajaan tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada BPDKS. 2. BPDKS kemudian melakukan telaah rekomendasi teknis, menetapkan dan membuat SK Dirut BPDKS atas pengusulan peremajaan tersebut. 3. BPDKS melakukan penandatanganan kerjasama tiga pihak (BPDKS, Bank Penyalur yang ditunjuk dan Koperasi/kelompok/gapokktan).
4	Penyaluran Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana peremajaan ditransfer oleh BPDKS melalui Bank yang ditunjuk. 2. Bantuan PSR dari pemerintah berupa dana hibah sebesar 30 juta (tidak dikembalikan). Diberikan maksimal 4 Ha/KK.

PERSYARATAN PENGAJUAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)

No.	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Peta non kawasan	Peta lokasi kebun	<p>Berbentuk peta kebun hamparan yang dilengkapi titik koordinat. Pengambilan titik koordinat dapat dilaksanakan secara acak untuk menentukan status lahan dan/atau pengambilan titik koordinat berdasarkan surat kepemilikan. Tujuan pemetaan di awal ini untuk memastikan kesesuaian lokasi kebun dengan status kawasan.</p> <p>Kegiatan pemetaan lokasi kebun akan didampingi/dikonsultasikan dari Tim Pemetaan DPP APKASINDO.</p>
2	Kelompok tani (POKTAN) atau koperasi beranggotakan paling sedikit 20 pekebun atau memiliki hamparan paling kurang 50 Ha dengan hamparan lahan berada dalam jarak antar kebun paling jauh 10 km	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP dan KK atau Surat Keterangan Kependudukan 2. Pas foto pengusul 	<p>KTP elektronik/non elektronik dan Kartu Keluarga atau surat keterangan kependudukan yang masih berlaku</p>
Legalitas susunan pengurus		<ol style="list-style-type: none"> a. POKTAN harus terdaftar sistem informasi penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN) atau surat keterangan dari Kepala Dinas daerah kabupaten/kota bagi yang belum terdaftar di SIMLUHTAN b. Koperasi harus berbadan hukum atau terdaftar pada Dinas yang menangani urusan koperasi kabupaten/kota. 	

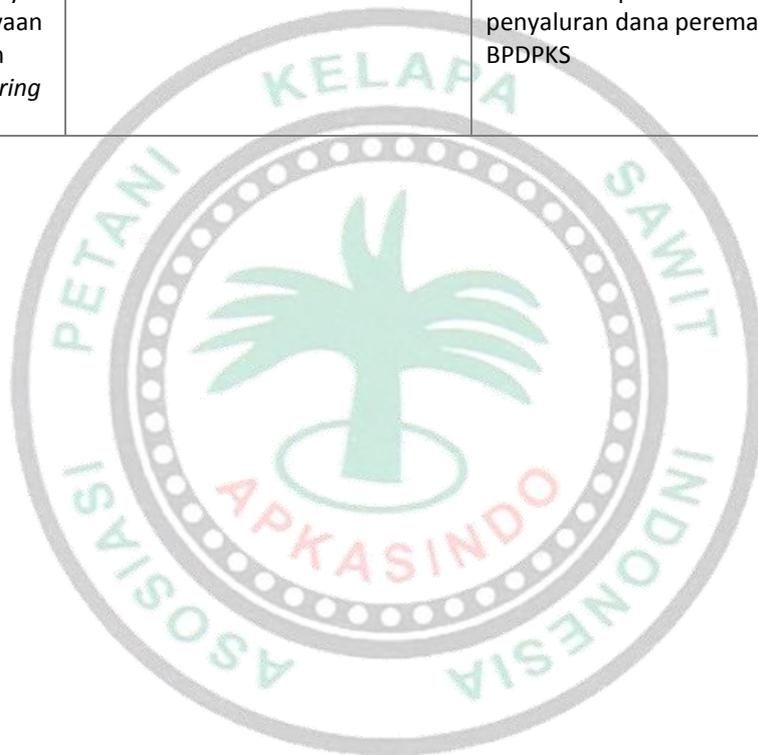
No.	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
			Khusus untuk Koperasi, hanya diperkenankan dalam bentuk Koperasi primer c. Untuk kelembagaan pekebun lainnya harus berbentuk akta notaris
		Nomor rekening Pekebun dan Lembaga pengusul	a. Nomor rekening baru masing-masing Pekebun dari bank mitra BDPKKS pada cabang yang sama, yang telah di verifikasi oleh BDPKKS; dan b. Nomor rekening baru sebagai rekening <i>escrow account</i> POKTAN atau koperasi dari Bank Mitra BDPKKS pada cabang yang sama dengan bank mitra pekebun
3	Legalitas lahan	Legalitas Lahan berupa SHM, SKT, SKGR, Sporadik, Girik (<i>letter c</i>), Akta Jual Beli (AJB), hak adat (komunal), SKGR atau hak atas tanah lain yang diakui keberadaannya	Legalitas yang resmi diterbitkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila nama Pekebun tidak sesuai dengan legalitas lahan, dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala desa atau surat register (<i>waarmerking</i>) atau kantor pertanahan setempat

**PERSYARATAN LAINNYA
UNTUK PENGAJUAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)**

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
1	Surat kuasa.	Surat kuasa pekebun kepada Ketua POKTAN atau koperasi	Ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa bermeterai cukup rangkap 2 (dua). Surat kuasa tersebut untuk melakukan: 1) pengelolaan dana peremajaan yang bersumber dari BDPKKS dari masing-masing pekebun untuk pelaksanaan peremajaan 2) perjanjian kemitraan kerja dengan kontraktor ataupun perusahaan mitra untuk pekerjaan peremajaan dengan dana yang bersumber dari BDPKKS 3) perjanjian kemitraan usaha dengan perusahaan mitra untuk jual beli TBS dan pengelolaan lainnya yang disepakati Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPKKS.
2	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) atau Surat Kesanggupan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STDB.	STD-B atau surat pernyataan dalam proses oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.	Berbentuk STD-B atau Surat kesanggupan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelesaikan penerbitan STD-B dengan masa waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dokumen dipenuhi maksimal 2 (dua) tahun sejak dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPKKS.

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
3	Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Tidak Dalam Sengketa.	Surat keterangan.	Surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atau Pejabat Kantor Pertanahan Setempat. Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS.
4	Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja.	Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja PO-P3 per usulan yang ditandatangani Ketua POKTAN atau koperasi	Berisi biaya pembangunan kebun dan biaya pengawasan bagi POKTAN atau koperasi. RAB dan rencana kerja mencakup kegiatan PO sampai dengan P3 sesuai dengan standar biaya peremajaan kelapa sawit pekebun yang ditetapkan meliputi: 1) Biaya/upah tenaga kerja (HK) berupa upah sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Peningkatan jalan, parit, pengawetan dan pengelolaan tanah, dan/atau tata air sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan. 3) Bahan dan alat berupa biaya penggunaan alat berat, bahan bakar minyak (BBM), pestisida, benih kelapa sawit, benih kacang/tumpang sari, pupuk, <i>knapsack sprayer</i> dan alat pertanian kecil. Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS.
5	Surat Pernyataan Umur Tanaman/ Produktivitas/ Asal Benih.	Surat pernyataan Kepala Dinas daerah kabupaten/kota.	a. Untuk kriteria berumur di atas 25 tahun sekurang-kurangnya memuat umur tanaman. b. Untuk kriteria produktivitas kurang dari/sama dengan 10 ton TBS/Ha/Tahun pada umur paling sedikit 7 tahun sekurang-kurangnya memuat umur tanaman dan produktivitas setahun terakhir. c. Untuk kriteria benih tidak unggul sekurang-kurangnya memuat umur tanaman dan pernyataan benih tidak unggul. Dokumen dipenuhi sebelum penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS.
6	Surat Ketersediaan Benih.	Perjanjian/Kontrak/ Nota Kesepakatan pembelian benih kelapa sawit.	Sekurang-kurangnya memuat jenis benih, jaminan kualitas, purna jual, prosedur pembayaran dan <i>force majeure</i> . Dokumen dimaksud dipenuhi setelah penyaluran dana dari BDPDKS dan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan lapangan.
7	Surat Kemitraan Kerja.	Perjanjian/ Kontrak kemitraan kerja yang diketahui oleh Kepala Dinas daerah Kabupaten/kota.	Sekurang-kurangnya memuat jangka waktu kerja sama, ruang lingkup kerja sama, biaya, hak dan kewajiban serta <i>force majeure</i> . Dokumen dimaksud dipenuhi setelah penyaluran dana dari BDPDKS dan sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan lapangan.

No.	Persyaratan	Dokumen	Panduan
8	Perjanjian Kemitraan Usaha.	Perjanjian Kerja sama kemitraan usaha yang diketahui oleh bupati/wali Kota atau Kepala Dinas daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.	Sekurang-kurangnya memuat jangka waktu kerja sama, ruang lingkup kerja sama, biaya, hak dan kewajiban serta <i>force majeure</i> . Dokumen dimaksud dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun setelah penanaman.
9	Surat Pernyataan Teknik Peremajaan.	Surat pernyataan peremajaan dengan tumbang serempak dari POKTAN atau koperasi	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua POKTAN atau koperasi. Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS.
10	Surat Pernyataan Kesiapan Bank/Lembaga Keuangan Lainnya Untuk Pembiayaan Tahap Lanjutan (<i>indicative offering letter</i>)	Surat pernyataan dari Bank/Lembaga keuangan lainnya untuk dana tahap lanjutan.	Berbentuk surat yang resmi diterbitkan oleh Bank/Lembaga keuangan lainnya. Dokumen dipenuhi sebelum dilakukan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit dari BDPDKS



**CONTOH SURAT-SURAT
UNTUK PENGAJUAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR)**



SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini menerangkan dan memberi kuasa kepada:

Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan : Ketua Koperasi/POKTAN

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

-----KUASA KHUSUS-----

Untuk bertindak mewakili saya dalam segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan permohonan pengajuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan dalam hal pemindahbukuan dari rekening saya ke rekening Koperasi/POKTAN..... pada Bank.....

Segala akibat yang timbul atas pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dengan membebaskan Bank..... dari segala akibat tuntutan atas pemindahbukuan dari rekening saya ke rekening Koperasi/POKTAN.....

Demikian Surat kuasa ini agar dapat dipergunakan semestinya.

....., 2020

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai 6000

**(Nama dan Gelar)
Ketua Koperasi/POKTAN**

**(Nama dan Gelar)
Jabatan**

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STD-B)

.....,2020

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penerbitan STDB

Kepada Yth;
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.....
Di -
Kota.....

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bersama dengan Surat permohonan ini kami berdoa semoga Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam keadaan sehat wal afiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Sehubungan dengan kegiatan Percepatan Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Kami Koperasi/POKTAN..... alamatyang mewakili dari KK dengan luas kebunHa akan melaksanakan kegiatan peremajaan kebun kelapa sawit dengan bantuan dana BPDPKS. Kemudian salah satu persyaratan yang harus di lengkapi untuk pengajuan bantuan dana tersebut dengan melampirkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota..... untuk melakukan Penerbitan STDB terhadap kebun kelapa sawit kami. Adapun data petani yang akan mengajukan penerbitan STDB ini sebagaimana terlampir.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat mengabulkannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pengurus Koperasi/POKTAN

Ketua

Sekretaris

(Nama dan Gelar)

(Nama dan Gelar)

Mengetahui
Kepala Desa.....

(Nama dan Gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Arsip

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Tanah/kebun kelapa sawit pekebun calon peserta peremajaan dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berlokasi di Kampung dan merupakan anggota Koperasi/POKTAN..... seluas..... Ha, dengan jumlah pekebun..... KK **tidak dalam status konflik atau sengketa dengan pihak mana pun.**

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan penggunaan dana peremajaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Dinyatakan di :
Pada Tanggal :

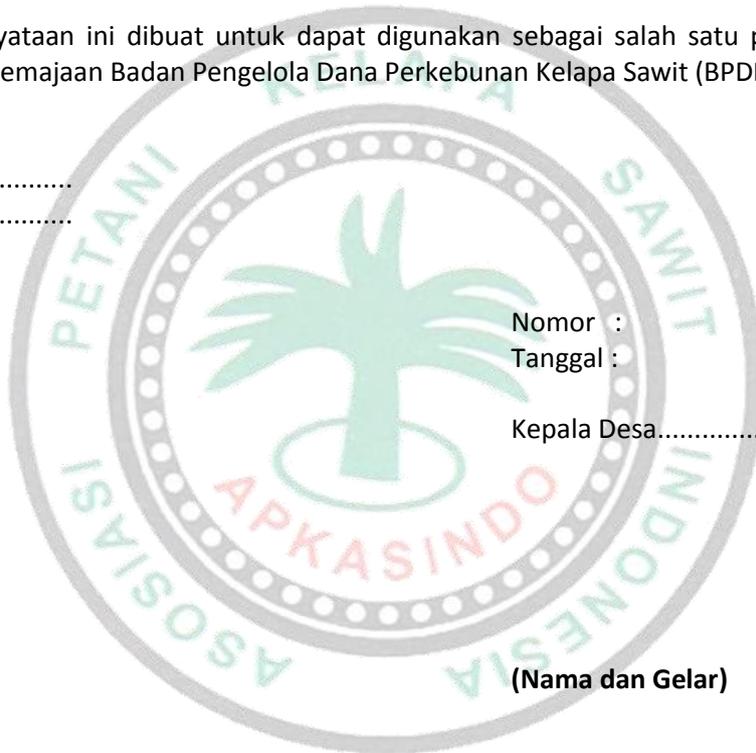
Nomor :
Tanggal :

Nomor :
Tanggal :
Kepala Desa.....

Mengetahui,
An. Camat.....
Sekretaris Camat

(Nama dan Gelar)
NIP.

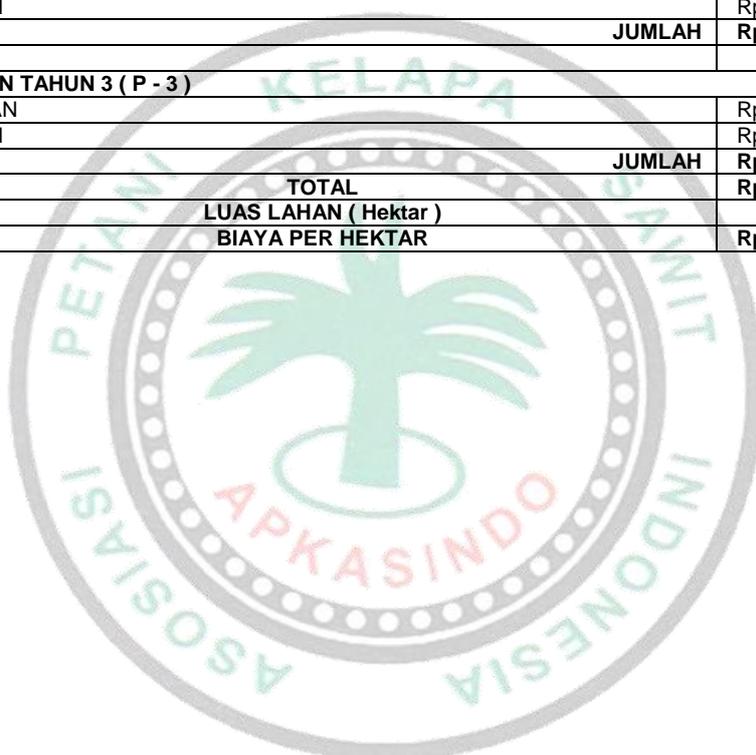
(Nama dan Gelar)



RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN RENCANA KERJA

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Koperasi/POKTAN.....

NO.	URAIAN	HARGA
TAHAP 1	PERSIAPAN LAHAN (P - 0)	
I	BAHAN	Rp 523.220.100
II	UPAH	Rp 1.613.766.911
	JUMLAH	Rp 2.136.987.011
TAHAP 2	PERAWATAN TAHUN 1 (P - 1)	
I	BAHAN	Rp 373.056.694
II	UPAH	Rp 377.251.626
	JUMLAH	Rp 750.308.320
TAHAP 3	PERAWATAN TAHUN 2 (P - 2)	
I	BAHAN	Rp 447.782.400
II	UPAH	Rp 419.501.336
	JUMLAH	Rp 867.283.736
TAHAP 4	PERAWATAN TAHUN 3 (P - 3)	
I	BAHAN	Rp 760.207.500
II	UPAH	Rp 498.092.327
	JUMLAH	Rp 1.258.299.827
A	TOTAL	Rp 5.012.878.894
B	LUAS LAHAN (Hektar)	89,70
C	BIAYA PER HEKTAR	Rp 55.884.938



STANDAR BIAYA PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) BERDASARKAN KEPDIRJENBUN 195 TAHUN 2020

STANDAR BIAYA PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKERJUN DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TAHUN 2020 DI LAHAN KERING/ MINERAL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
 NOMOR 195/K/PS/SR-210/5/2020
 TENTANG STANDAR BIAYA PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKERJUN
 DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA
 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

NO	KEGIATAN	WILAYAH I		WILAYAH II		WILAYAH III		WILAYAH IV		WILAYAH V		WILAYAH VI	
		TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat	21,857,783	24,672,983	22,186,694	25,257,494	21,967,420	24,867,820	22,077,057	25,062,657	21,967,420	24,867,820	22,888,371	26,504,451
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	7,589,047	10,487,003	8,203,197	11,551,057	7,793,763	10,841,688	7,998,480	11,196,372	7,793,763	10,841,688	9,513,383	13,821,039
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	9,698,807	12,412,672	10,415,493	13,606,358	9,937,702	12,810,567	10,176,597	13,208,462	9,937,702	12,810,567	11,944,423	16,152,888
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	11,315,884	13,667,014	12,275,387	15,038,537	11,635,719	14,124,189	11,955,553	14,581,363	11,635,719	14,124,189	14,322,327	17,964,453
JUMLAH PO + P1 + P2 + P3		50,461,521	61,239,673	53,080,771	65,453,447	51,334,604	62,644,264	52,207,688	64,048,855	51,334,604	62,644,264	58,668,504	74,442,831

Catatan
 Wilayah I Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali
 Wilayah II Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung
 Wilayah III Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau
 Wilayah IV Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
 Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
 Wilayah V Maluku, Maluku Utara
 Wilayah VI Papua, Papua Barat

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

 KASDI SUBAGIONO

*Model Awal Tumpang Sari bersumber dari luar dana BPPDKS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
 NOMOR 195/Kpts/SR.210/5/2020
 TENTANG STANDAR BIAYA PEREMAJUAN KELAPA SAWIT PEKEBUN
 DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA
 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

STANDAR BIAYA PEREMAJUAN KELAPA SAWIT PEKEBUN DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 TAHUN 2020 DI LAHAN BASAH

NO	KEGIATAN	WILAYAH I		WILAYAH II		WILAYAH III		WILAYAH IV		WILAYAH V		WILAYAH VI	
		TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI	TERENDAH	TERTINGGI
1	Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat	22,759,996	25,575,196	23,088,907	26,159,707	22,869,633	25,770,033	22,979,270	25,964,870	22,869,633	25,770,033	23,790,584	27,406,664
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	7,741,392	10,639,348	8,323,786	11,671,646	7,935,523	10,983,447	8,129,654	11,327,547	7,935,523	10,983,447	9,566,226	13,873,882
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	10,572,542	13,286,407	11,253,571	14,444,436	10,799,552	13,672,417	11,026,562	14,058,427	10,799,552	13,672,417	12,706,433	16,914,898
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	12,290,980	14,642,110	13,088,991	15,852,141	12,556,984	15,045,454	12,822,987	15,448,797	12,556,984	15,045,454	14,791,414	18,433,540
JUMLAH P0 + P1 + P2 + P3		53,364,911	64,143,062	55,755,255	68,127,931	54,161,692	65,471,352	54,958,474	66,799,641	54,161,692	65,471,352	60,854,657	76,628,984

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,


 KASDI SUBAGYONO

Catatan
 Wilayah I Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali
 Wilayah II Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung
 Wilayah III Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau
 Wilayah IV Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
 Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
 Wilayah V Maluku, Maluku Utara
 Wilayah VI Papua, Papua Barat

*Modal Awal Tumpang Sari bersumber dari luar dana BPPPKS

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
 NOMOR 195/Kpts/SR.210/5/2020
 TENTANG STANDAR BIAYA PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PERKEBUN
 DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**STANDAR BIAYA PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PERKEBUN DALAM KERANGKA PENDANAAN BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
 TAHUN 2020 DI LAHAN ENDEMIK GANODERMA**

NO	KEGIATAN	WILAYAH I		WILAYAH II		WILAYAH III		WILAYAH IV		WILAYAH V		WILAYAH VI	
		TERENDAH	TINGGI										
1	PO Pembukaan lahan dan penanaman - Tenaga Kerja - Infrastruktur - Bahan dan Alat	31.363,802	34.307,002	32.338,517	35.537,317	31.688,707	34.717,107	32.013,612	35.127,212	31.688,707	34.717,107	34.417,909	38.161,989
2	P1 Pemeliharaan tahun pertama - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	7.632,307	10.635,323	8.246,457	11.717,917	7.837,023	10.996,188	8.041,740	11.357,052	7.837,023	10.996,188	9.556,643	14.027,451
3	P2 Pemeliharaan tahun kedua - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	9.582,884	12.296,749	10.299,570	13.490,435	9.821,779	12.694,644	10.060,675	13.092,540	9.821,779	12.694,644	11.828,500	16.036,965
4	P3 Pemeliharaan tahun ketiga - Tenaga Kerja - Bahan dan Alat	11.195,591	13.546,721	12.040,644	14.803,794	11.477,275	13.965,745	11.758,959	14.384,769	11.477,275	13.965,745	13.843,423	17.485,549
JUMLAH PO + P1 + P2 + P3		59.774,583	70.785,795	62.925,187	75.549,463	60.824,785	72.373,684	61.874,986	73.961,574	60.824,785	72.373,694	69.646,476	85.711,955

Catatan
 Wilayah I Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali
 Wilayah II Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Bangka Belitung
 Wilayah III Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau
 Wilayah IV Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo,
 Wilayah V Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
 Wilayah VI Papua, Papua Barat

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

 KABDI SUBAGYONO

SURAT PERNYATAAN UMUR TANAMAN/PRODUKTIVITAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanaman kelapa sawit yang diusulkan Koperasi/POKTAN untuk diremajakan dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Desasudah berumurtahun berdasarkan Tahun Tanamatau produktivitas kurang dari 10 Ton TBS/Ha/Tahun (dapat dipilih salah satu).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



....., 2020

Yang menyatakan,
Kepala Dinas Kab/kota

.....

SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN KETERSEDIAAN BIBIT

No :
Lamp :
Hal : Permohonan Dukungan Bibit Ketersediaan Bibit

Kepada Yth,
Direktur PT.....
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Seiring Salam dan Doa kami sampaikan kepada Bapak semoga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat lindungan dan rahmat Allah SWT, Amin.

Dapat kami sampaikan bahwa kami merupakan Koperasi yang sedang dalam proses pengajuan bantuan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan luas lahan pengajuan sebanyak Hektar yang terletak di

Adapun dalam pengajuan tersebut, kami dipersyaratkan untuk memiliki dukungan ketersediaan bibit dari sumber bibit atau benih, untuk itu kami mohon kiranya PT..... mempersiapkan kebutuhan bibit siap tanam untuk kami serta memberikan kami surat dukungan ketersediaan bibit kelapa sawit siap tanam bersertifikat sesuai dengan yang dipersyaratkan BPDPKS.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk dapat dikabulkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Pengurus Koperasi/POKTAN.....

Ketua

Sekretaris

(Nama dan Gelar)

(Nama dan Gelar)

CONTOH JAWABAN SURAT KETERSEDIAAN BENIH



PT. Riset Perkebunan Nusantara
PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT
Indonesian Oil Palm Research Institute



Accredited by



No : 1415/PPKS/0.1/VII/2020
Lamp. : -
Hal : *Ketersediaan Bibit Kelapa Sawit*

Medan, 07 Juli 2020

Kepada Yth. _____

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : 28/SPH/KM/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 mengenai hal tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa pada prinsipnya Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dapat menyediakan kebutuhan bibit siap tanam sebanyak 52.500 pokok dengan luas lahan 150 Ha. Saat ini bibit tersedia di kebun Kalianta Jln. Padasa Kalsa KM. 4 Desa Kabun, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, Riau & Dalu-dalu Desa Sei kumango, Kec. Tembusai, Kab. Rokan Hulu. Untuk mendukung kegiatan program pemerintah dalam hal peremajaan sawit rakyat dengan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kepercayaan Bapak terhadap PPKS.



Cc:-Arsip

Semua korespondensi mohon ditujukan kepada Direktur melalui alamat atau email di bawah
Please address all correspondence to the Director at the address or the email below

Sinergi – Integritas – Profesional

Jl. Brigjen Katamso
No. 51
Kampung Baru
Medan 20158

☎ 061-786 2477
☎ 061-786 2488
✉ admin@iopri.org
🌐 www.iopri.org

SURAT KEMITRAAN KERJA

Nomor : 2020
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
Ketua Koperasi/POKTAN.....
Di
.....

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat yang saudara sampaikan kepada kami dengan nomor tanggal..... Perihal Permohonan Dukungan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dengan luas Hektar.

Setelah kami pelajari dengan saksama lokasi kebun yang rencananya akan diremajakan, maka dengan ini kami memberikan dukungan dan menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan peremajaan kebun kelapa sawit di Koperasi/POKTAN.....

Demikian surat dukungan dan pernyataan kesanggupan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kesempatan bekerja sama yang diberikan kepada kami diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT.

(Nama dan Gelar)
Jabatan

PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA

.....,.....2020

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan *off Taker*

Kepada Yth,
Direksi PT.....
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Seiring Salam dan Do'a kami sampaikan kepada Bapak semoga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat lindungan dan rahmat Allah SWT, Amin.

Sehubungan akan dilaksanakannya peremajaan kebun kelapa sawit Koperasi/POKTAN.....Tahun 2020 melalui bantuan dana hibah BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) seluasHa dengan jumlah 50 KK. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana tersebut adalah kesediaan Perusahaan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) sebagai *Off Taker*.

Maka dari itu kami dari Koperasi/POKTAN.....yang mewakili 50 Kepala Keluarga (KK) memohon bantuan kepada PT..... agar dapat menjadi *Off Taker* Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) .

Demikian Surat ini kami buat, besar harapan kami bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatian Direksi PT..... dan jajarannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pengurus Koperasi/POKTAN.....

Ketua

Sekretaris

(Nama dan Gelar)

(Nama dan Gelar)

Mengetahui
Kepala Desa.....

(Nama dan Gelar)

Tembusan:

1. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.....
2. Camat.....
3. Kepala Desa.....
4. Arsip

SURAT PERMOHONAN MITRA PERBANKAN

.....,2020

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Permohonan Mitra Perbankan

Kepada Yth;
Pimpinan PT. Bank.....
Di-
Kota.....

Dengan Hormat,

Seiring Salam dan Doa kami sampaikan kepada Bapak semoga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapat lindungan dan rahmat Allah SWT, Amin.

Sehubungan akan dilaksanakannya peremajaan kebun kelapa sawit Gapoktan..... Tahun 2020 melalui bantuan dana hibah BDPKKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) seluas..... Ha dengan Jumlah 36 KK. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana BDPKKS adalah kesediaan Perbankan (Bank) sebagai Mitra Penampung Dana dan Penjamin Kekurangan Dana Pembangunan Kebun Kelapa Sawit. Maka dari itu kami dari Gapoktan memohon kesediaan kepada Bank Riau Kepri agar dapat menjadi mitra penampung dana dan penjamin kekurangan dana pembangunan kebun kelapa sawit.

Demikian Surat ini kami buat, besar harapan kami bapak dapat mengabulkannya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pengurus Gapoktan.....

Hormat Kami
Pengurus Koperasi/POKTAN.....

Ketua

Sekretaris

(Nama dan Gelar)

(Nama dan Gelar)

Mengetahui
Kepala Desa.....

(Nama dan Gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Dinas Pertanian Kabupaten.....
2. Camat.....
3. Kepala Desa.....
4. Arsip

Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 202/Kpts/KB.120/6/2020 tentang Pedoman Teknis Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 195/Kpts/SR.210/5/2020 tentang Standar Biaya Peremajaan Sawit Pekebun Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor KEP-167/DPKS/2020 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.



INFORMASI LEBIH LANJUT DAN KONSULTASI

◆◆ LAYANAN PSR APKASINDO ◆◆

Telp : 0852-6116-4242 (Eko Jaya Siallagan)
Telp : 0823-8447-7746 (Perawati)
Email : dppapkasindo@yahoo.com
Website : www.dpp-apkasindo.com